



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : UCOK PARSAULIAN HASUGIAN
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 433584

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **479.931.200**

1. Tanah Seluas 1175 m2 di KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 2965 m2/27 m2 di BENGKAYANG, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
4. Tanah Seluas 200 m2 di KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/45 m2 di KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
6. Tanah Seluas 1312 m2 di KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 114.931.200

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **110.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA V Tahun 2007, WARISAN Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **96.800.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **420.086.118**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----

Rp. 1.107.317.318

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.107.317.318

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.